

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA KENDARI**

*AN ANALYSIS ON FACTORS AFFECTING
HOTEL TAX REVENUE IN KENDARI CITY*

ARNITA DEWI



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA KENDARI**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi
Magister Keuangan Daerah**

Disusun dan diajukan oleh

ARNITA DEWI

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA KENDARI

Disusun dan diajukan oleh

ARNITA DEWI

Nomor Pokok P2600205523

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 24 februari 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisis Penasihat,

Prof. Dr. H. A. Karim Saleh

Ketua

Ketua Program
Magister Keuangan Daerah

Drs. A. Kahar Akil, MS

Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Muhammad Yunus Zain, MA

Prof. Dr. dr.A. Razak Thaha, M.Sc

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat,rahmat dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat Akademik guna memperoleh Gelar Magister pada program Study Magister Keuangan Daerah (MKD) Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr.H.A. Karim Saleh selaku pembimbing I dan Bapak Drs. A. Kahar Akil, MS selaku pembimbing II yang telah banyak mencurahkan pikiran dan meluangkan waktu serta dengan kesabaran, ketekunan, dan kebijaksanaannya membimbing penulis dalam pembuatan tesis ini.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimah kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs.H. Masyhur Masie Abunawas, M.Si selaku Walikota Kendari dan Bapak Amarullah Doko, SE, M.Si selaku Kepala Dispenda Kota Kendari yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan ini.

2. Seluruh teman-teman staf Dispenda Kota Kendari, atas segala doa, bantuan, serta dukungannya selama penulis melaksanakan pendidikan ini.
3. Seluruh staf dosen Magister Keuangan Daerah yang dengan semangat pengabdian telah mentransferkan ilmu pengetahuan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
4. Kedua orang tua yang kukasihi, Drs. Aburaerah Tosepu serta Hj. Roslian Banawula, saudara-saudaraku yang tercinta, serta Zulkarnaen Abdullah yang selama penulis melaksanakan pendidikan ini selalu memberikan doa, bantuan dan dukungannya.
5. Seluruh teman-teman seangkatan tahun 2005
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya bagi kita semua.

Akhirnya disadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu, segala kritikan dan saran yang positif konstruktif akan disambut dengan senang hati demi penyempurnaan tulisan ini.

Makassar, februari 2007

Penulis,
Arnita Dewi

ABSTRAK

ARNITA DEWI. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari* (dibimbing oleh H.A. Karim Saleh dan A. Kahar Akil).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB sektor hotel, jumlah pengunjung/wisatawan, dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Kendari

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kuantitatif dengan program SPSS.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel PDRB sektor hotel, jumlah pengunjung/wisatawan, dan jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Kendari. Variabel jumlah hotel (X_3) memiliki elastisitas paling tinggi terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Kendari dibandingkan dengan variabel PDRB sektor hotel (X_1) dan jumlah pengunjung/wisatawan (X_2).

ABSTRACT

ARNITA DEWI. An analysis on Factors Affecting Hotel Tax Revenue in Kendari City (supervised by H. A. Karim Saleh and A. Kahar. Akil)

This research aimed to analyze the influence of gross regional domestic product of hotel sector, the number of visitors / tourists, the number of hotel on hotel tax revenue in Kendari City.

The data in this research were obtain through observation and documentation. They were then analyzed descriptively using SPSS method.

The results show that, the variables of gross regional domestic product of hotel sector, the number of visitors / tourist, the number of hotel simultaneously have a significant influence on hotel tax revenue in Kendari City. The number of hotel (X3) has the highest elasticity on hotel tax revenue in Kendari City compared to the variables of gross regional domestic product of hotel sector (X1) and the number of visitors / tourists (X2).

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	I
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
Bab. I . Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
Bab . II. Tinjauan Pustaka	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Penerimaan Pemerintah	10
C. Pajak Daerah	13
D. Retribusi Daerah	17
E. Pajak Hotel	19
F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel	21
G. Kerangka Pemikiran	25
H. Hipotesis	28

Bab . III. Metode Penelitian

A. Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Sumber data	30
C. Metode Pengumpulan Data	31
D. Metode Analisis	31
E. Definisi Operasional Variabel	36

Bab. IV. Gambaran Umum dan Hasil Penelitian.

A. Deskripsi Daerah Penelitian	37
B. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	46
C. Keadaan Perhotelan	47
D. Perkembangan Pajak Hotel	49
E. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Kendari	51
F. Perkembangan PDRB Sektor Hotel	52
G. Perkembangan Jumlah Pengunjung/ wisatawan	54
H. Perkembangan Jumlah Hotel	55
I. Pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ wisatawan, dan Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel	56

Bab. V. Kesimpulan dan Saran.

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman.
1.	Realisasi PAD dan kontribusinya terhadap APBD Kota Kendari	3
2.	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari	5
3.	Luas Wilayah Kota Kendari	39
4.	Penduduk Kota Kendari menurut jenis kelamin	40
5.	Jenis Lapangan Usaha penduduk Kota Kendari	41
6.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Kendari	47
7.	Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Kendari	49
8.	Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari	50
9.	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Kendari	51
10.	Perkembangan PDRB Sektor Hotel di Kota Kendari	53
11.	Perkembangan Jumlah Pengunjung/ Wisatawan di Kota Kendari	55
12.	Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Kendari	56
13.	Perkembangan PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ Wisatawan, dan Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari.	57
14.	Hasil analisis Pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ Wisatawan, dan Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari	58
15.	Analisis Varians pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ Wisatawan, Jumlah Hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel	61

DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Halaman
1.	Skema Kerangka Pikir Penelitian	27

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran.1. Perkembangan Pajak Hotel, PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ wisatawan, dan Jumlah Hotel di Kota Kendari Tahun 1996-2005.
- Lampiran 2. Logaritma Natural (ln) Pajak Hotel, PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ Wisatawan, dan Jumlah Hotel di Kota Kendari Tahun 1996-2005.
- Lampiran 3. Hasil Analisis Regresi Pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ Wisatawan, dan Jumlah Hotel terhadap Pajak Hotel di Kota Kendari.
- Lampiran 6. Uji Heteroskedastisitasn Pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/ Wisatawan, dan Jumlah Hotel terhadap Pajak Hotel di Kota Kendari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 menyatakan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakatnya.

Keberhasilan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah di bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Untuk menjalankan fungsi pemerintah, faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya.(Kaho, 1997)

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa

sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan yang berasal dari daerah sendiri, yang terdiri dari (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi ; (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan-pembangunan di daerah. Karena semakin banyak kebutuhan daerah dapat di biayai dengan Pendapatan Asli Daerah , maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah,juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya (Syamsi, 1987).

Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan daerah di era otonomi, maka sangat diperlukan usaha-usaha dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sendiri yaitu dengan upaya peningkatan penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan upaya penggalan sumber-sumber pendapatan yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan potensi ekonomi daerah

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut..Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam

merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada Prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. (Insukindro dkk, 1994)

Kontribusi PAD terhadap APBD kota kendari selama sembilan tahun terakhir yaitu periode tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2004 dapat dilihat sebagaimana pada tabel :

Tabel 1. Realisasi PAD dan kontribusi PAD terhadap APBD Kota Kendari T.A 1996/1997 S/D 2004

No	Tahun Anggaran	PAD (Rp)	APBD (Rp)	Kontribusi (%)
1	1996/1997	2,157,836,141	19,912,541,914	11,09
2	1997/1998	3,167,789,187	26,596,202,529	11.91
3	1998/1999	3,750,097,129	35,266,794,977	10.63
4	1999/2000	4,105,364,185	42,964,643,168	9.56
5	2000	4,123,033,539	47,405,271,962	8.70
6	2001	8,759,542,302	100,069,038,001	8.79
7	2002	12,261,041,394	140,788,089,413	8.71
8	2003	13,789,839,100	192,632,257,452	7.16
9	2004	14,112,540,263	197,966,870,534	7.13
Rata-rata				9,30

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kendari 2005

Tabel 1 memperlihatkan bahwa besarnya PAD pada periode 1996/1997-2004 terus meningkat , namun presentase kontribusinya terhadap

APBD cenderung menurun dengan rata-rata 9.30 persen pertahun. Penurunan tersebut menunjukkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pengeluaran secara relatif di banding dengan sumber dana lainnya terus menurun.

Fakta tersebut memacu Pemerintah Kota Kendari tarus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Peningkatan PAD diupayakan melalui memaksimalkan semua sumber PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan Pajak Hotel.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Kendari yang cukup potensial adalah Pajak Hotel yang objeknya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di Kota Kendari sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara, merupakan sentral aktivitas baik pemerintahan dan pembangunan maupun bisnis dan perdagangan sehingga memiliki daya serap yang tinggi dalam pengembangan usaha perhotelan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak hotel. Selain itu Kota Kendari juga merupakan daerah tujuan sekaligus kota transit bagi wisatawan yang akan berkunjung ke

Sulawesi Tenggara, yang tentunya merupakan potensi pengembangan terhadap jasa perhotelan di Kota Kendari.

Realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Kendari selama sepuluh tahun terakhir yaitu tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari T.A 1996/1997 – 2005

NO	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan realisasi (%)
1	1996/1997	16,000,000	19,904,871	
2	1997/1998	22,000,000	32,937,828	65.48
3	1998/1999	30,000,000	33,821,133	2.68
4	1999/2000	49,000,000	49,291,130	45.74
5	2000	64,000,000	57,983,007	17.63
6	2001	73,000,000	79,300,674	36.77
7	2002	95,000,000	103,109,417	30.02
8	2003	100,000,000	104,903,702	1.74
9	2004	100,000,000	123,452,600	17.68
10	2005	179,000,000	202,057,450	63.67

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kendari 2005

Secara umum gambaran realisasi penerimaan Pajak Hotel mulai Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan Tahun Anggaran 2005,

pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel Menunjukkan Trend yang pluktuatif. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan realisasi pajak hotel mengalami peningkatan yang signifikan terjadi pada Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebesar 65,48 % sedangkan pada tahun Anggaran1998/1999 mengalami penurunan sebesar 2,68 %, kemudian pada Tahun 1999/2000 kembali terjadi kenaikan sebesar 45,74 %,kemudian pada tahun 2003 turun menjadi 1,74 %, selanjutnya Tahun 2004 dan 2005 kembali terjadi kenaikan sebesar 17,68 % dan 63,67 %.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA KENDARI”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini sangat penting artinya, karena dapat dijasikan sebagai acuan untuk melakukan pembahasan selanjutnya . Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

Seberapa besar pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/wisatawan, serta Jumlah Hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari.

C. Tujuan Penelitian

Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

Besarnya pengaruh PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/wisatawan, serta Jumlah Hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kota Kendari dalam rangka perumusan dan pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak Hotel.
- b. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat ilmiah dalam rangka menambah wawasan sehubungan dengan peranan Pajak hotel dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hendranto (2002) dengan penelitiannya berjudul : “ Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan restoran di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan”.

Hasil Penelitian ini antara lain adalah pertumbuhan penduduk perkotaan sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel dan restoran dilihat dari keeretan korelasi yang dihasilkan (koofisien korelasi r) sebesar 0.975 disusul oleh jumlah pengunjung (r) sebesar 0.994 dan PDRB (r) sebesar 0.938.

Hamid (2004) dengan penelitiannya berjudul : “ Analisis Efisiensi dan Efektifitas serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penrimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Samarinda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dalam upaya pengumpulan pajak hotel dan restoran lingkup kota Samarinda sangat efisien. Variabel pendapatan perkapita, PDRB sektor hotel dan restoran, jumlah pengunjung hotel, dan frekwensi even promosi secara bersama-sama berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota

Samarinda. Adapun variabel yang dominan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Samarinda adalah variabel PDRB Sektor hotel dan restoran dengan nilai *Standardized Coefficients* sebesar 0.768.

Sidik (2002) mengatakan bahwa :

“ Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, pinjaman, maupun Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat”.

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pemberian otonomi adalah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk tercapainya tujuan tersebut maka titik berat otonomi

diletakkan di daerah kabupaten dan daerah kota dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten kota lebih langsung berhubungan dengan masyarakat.

B. Penerimaan Pemerintah

Penerimaan pemerintah diartikan sebagai penerimaan dalam arti yang luas yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Sumber-sumber penerimaan pemerintah menurut (Suparmoko ,2000) dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Pajak.

Yang dimaksud dengan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat di tunjuk

b. Retribusi.

Yang dimaksud dengan retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

- c. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara.

Penerimaan yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan (harga) barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara.

- d. Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah

- e. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah.

Seperti pembayaran biaya-biaya perizinan (lisensi), tol atau pungutan sumbangan pada jalan raya tertentu.

- f. Pencetakan Uang Kertas.

Karena fungsi dan sifatnya maka pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para individu dalam masyarakat. Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang atau meminta kepada bank Sentral guna memberi pinjaman kepada pemerintah walaupun tanpa ada agunan.

- g. Hasil dari Undian Negara.

Dengan undian Negara pemerintah akan mendapatkan dana yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dijual dengan semua pengeluaran-pengeluaran termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian Negara tersebut.

- h. Pinjaman

Pinjaman ini dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

i. Hadiah.

Sumber dana dan jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberi hadiah kepada pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi adalah :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- Hasil pajak daerah
- Hasil retribusi daerah
- Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :

- Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam.

- Dana alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Pinjaman Daerah.

Pemerintah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam dan luar negeri melalui persetujuan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya.

d. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Antara lain hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari berbagai sumber penerimaan pemerintah daerah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi sumber terbesar bagi pemerintah daerah adalah alokasi dari pemerintah pusat, dengan demikian peran pemerintah pusat masih sangat besar dalam mewujudkan otonomi daerah, sebab penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain belum mampu menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

C. Pajak Daerah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang umumnya dilaksanakan oleh setiap Negara yang menerapkan kebijaksanaan Desentralisasi (Otonomi Daerah) dan biasanya ruang lingkup pajak ini ditentukan oleh pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat sejauh mana penerapan kebijaksanaan desentralisasi yang dianut, pada Negara yang menganut kebijaksanaan desentralisasi yang tinggi cenderung akan memberikan sumber-sumber pendapatn yang cukup tinggi kepada daerahnya.

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal (1) ayat (6) bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dave (1998) berpendapat bahwa :

"Pajak daerah merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional yang dalam otonomi daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah".

Menurut Kunarjo (1996) yang dimaksud dengan :

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah”.

Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai pungutan wajib yang dapat dilakukan oleh daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung diberikan dan digunakan untuk membiayai kegiatan umum yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah daerah.

Dalam pungutannya, ruang lingkup pajak daerah kabupaten/ kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan jalan (PPJ)
- e. Pajak Parkir
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Hiburan

- **Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dan berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak.

1. **Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)**, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. **Fungsi Mengatur (*Reguler*)**, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan dibidang sosial dan ekonomi , sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

- **Perbedaan Pajak Negara dan Pajak Daerah.**

Pajak Negara adalah merupakan pajak sumber pemasukan dana yang pengelolaannya masuk ke pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan Negara. Pajak Daerah adalah merupakan pajak yang pungutannya dilakukan oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang terdiri dari pajak dan Retribusi daerah.

Pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

1. Pajak daerah tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat

2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak boleh terlalu banyak jenisnya.
3. Biaya Administrasi harus rendah.
4. Tidak mencampuri sistim perpajakan pusat menurut peraturan peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

D. Retribusi Daerah.

Kaho (1991) menjelaskan bahwa :

“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkementingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi daerah yang selanjutnya disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, kepentingan orang pribadi atau hukum.

Dari pengertian retribusi diatas maka dapat dirumuskan ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh daerah

Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan dan langsung dapat ditunjuk. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan daerah.

b. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka jenis-jenis retribusi daerah terbagi atas 3 (tiga) pengelompokan retribusi meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum

Yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya-biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

E. Pajak Hotel

Menurut pendapat Mugodim (1999) :

“Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk menginap/istirahat ,memperoleh pelayanan,dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran “

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak hotel merupakan salah satu dari komponen pajak daerah,yakni yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dari hotel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 tahun 2005 tentang pajak hotel ,yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Hotel yang dimaksud adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran meliputi :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubug pariwisata (*Cottage*), motel, wisma pariwisata,pesanggrahan

(hotel) losmen dan rumah penginapan;

2. Pelayanan penunjang antara lain : Restoran, Telepon, faximil, telex ,fotocopy, pelayanan binatu, setrika,taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel;
3. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain : pusat kebugaran (fitnes center) kolam renang, tennis lapangan, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel;
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;

Sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak hotel adalah :

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
2. Asrama dan pondok pesantren
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
4. Pertokoan,perkantoran,perbankan,salon, yang dipakai oleh umum dihotel;
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Adapun subyek pajak hotel sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 pasal 3 tahun 2005 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Dasar pengenaan

pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dengan tarif paling tinggi 10% dan ditetapkan melalui peraturan daerah.

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Hotel

Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 : penjelasan pasal 28 ayat (2) : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah.

Berkembangnya produksi suatu sub sektor dalam PDRB dapat membawa dampak pada kegiatan ekonomi lainnya. Dalam hal ini kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah, berkembangnya produksi suatu sub sektor dalam PDRB berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga diharapkan pula meningkatkan penerimaan PAD.

Alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDRB dalam menilai pertumbuhan ekonomi adalah :

1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian daerah atau negara. Hal ini berarti

peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

2. PDRB dihitung atas dasar konsep aliran artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauhmana kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Pertumbuhan ekonomi sektor perhotelan dapat digambarkan oleh besarnya PDRB sektor perhotelan. Prospek perhotelan akan memberikan bagaimana gambaran tingkat hunian yang tinggi dalam suatu daerah.

Besarnya PDRB sektor ini secara otomatis menggambarkan besarnya pungutan pajak yang diterima oleh pemerintah melalui pajak daerah khususnya pajak hotel.

b. Jumlah Pengunjung/ Wisatawan

Mengingat Kota Kendari tidak memiliki potensi yang besar di bidang pertanian, maka Kota Kendari harus memperkuat potensi dalam bidang jasa

dan pelayanan serta jasa pendukung lainnya berupa penyediaan hotel yang representatif agar para wisatawan dan para industriawan yang membuka pabrik diluar kota dapat berkantor di Kota Kendari sesuai potensi jasa perkotaan yang lebih memadai dibandingkan daerah sekitar

Pengunjung merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

Menurut Muqodim (1999) :

“pengunjung merupakan subyek pajak yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran”

Pengembangan perkotaan dalam bidang pelayanan dan jasa serta sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata baik di daerah sendiri maupun daerah sekitar, maka Kota Kendari harus menyediakan jasa pendukung berupa penyediaan hotel dan sarana lainnya untuk memberikan pelayanan bagi pengunjung /wisatawan yang melakukan kunjungan di Kota Kendari dan daerah sekitarnya.

Keterkaitan yang erat antara sektor hotel dengan pengunjung/ wisatawan baik asing maupun domestik membuat perkembangan produksi perhotelan sangat dipengaruhi oleh para pengunjung/wisatawan yang datang di Kota Kendari dan indikator yang paling tepat untuk memperkirakannya adalah lamanya pengunjung/ wisatawan menginap selama berkunjung di Kota Kendari.

Perkembangan dunia pariwisata berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Perbaikan indikator-indikator makro ekonomi dunia merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Proyeksi kunjungan wisatawan juga memperhatikan daya dukung pariwisata yang dapat di sediakan oleh Pemda dan masyarakat sekitarnya. Daya dukung didefinisikan sebagai jumlah manusia yang dapat memanfaatkan wilayah pariwisata khususnya tanpa menimbulkan gangguan yang tidak diinginkan pada lingkungan fisik, sosial masyarakat, ekonomi serta budaya dari kawasan, serta tanpa adanya penurunan kualitas akibat kehadiran pengunjung.

c. Jumlah Hotel

Sarana penunjang lainnya dalam kegiatan ekonomi kepariwisataan maupun kegiatan sosial lainnya adalah tersedianya fasilitas pemondokan yaitu hotel dan losmen yang cukup baik. Yang dimaksud fasilitas disini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang (melati), serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap.

Pertambahan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh kelahiran dan

pendatang akan menambah penerimaan oleh karena bertambahnya orang yang menginap.

Devas (1989) bahwa :

“Pajak Hotel sangat cocok diperkotaan, karena masyarakatnya mempunyai mobilitas yang cukup tinggi dan obyek pajak jelas tempatnya”.

Perkembangan fasilitas akomodasi hotel dalam suatu wilayah, secara tidak langsung akan menggairahkan dan menunjang aktifitas ekonomi secara luas. Ketersediaan fasilitas akomodasi hotel yang semakin memadai akan mendorong aktivitas sektor perdagangan, sektor angkutan,kepariwisataan serta berbagai sektor ekonomi lain.

Dengan demikian peningkatan prospek perakomodasian ini tetap harus terus dikembangkan baik secara kuantitas maupun kualitas sejalan dengan promosi kepariwisataan yang terus digalakkan dalam rangka meningkatkan aktivitas perhotelan sebagai sumber devisa daerah.

G. Kerangka Pikir.

Salah satu argumentasi strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota, sedapat mungkin memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai sejumlah hak dan kewenangan desentralisasi yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat.

Kapasitas dan kemampuan keuangan pemerintah sangat menentukan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya baik dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan, maupun dalam kapasitas sebagai administrator pelaksanaan pembangunan.

Sehubungan dengan itu, maka dalam memenuhi tuntutan tersebut pemerintah kabupaten dan kota mau tidak mau harus berupaya memaksimalkan potensi-potensi penerimaan yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan atas tuntutan tersebut pemerintah Kota Kendari sebagai salah satu daerah otonom, berupaya memaksimalkan sumber-sumber penerimaan daerah.

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel di kota Kendari antara lain adalah PDRB sektor hotel yang menggambarkan tingkat pendapatan regional sektor tersebut yang secara otomatis akan menggambarkan hubungannya dengan pungutan pajak yang akan diterima oleh pemerintah Kota Kendari.

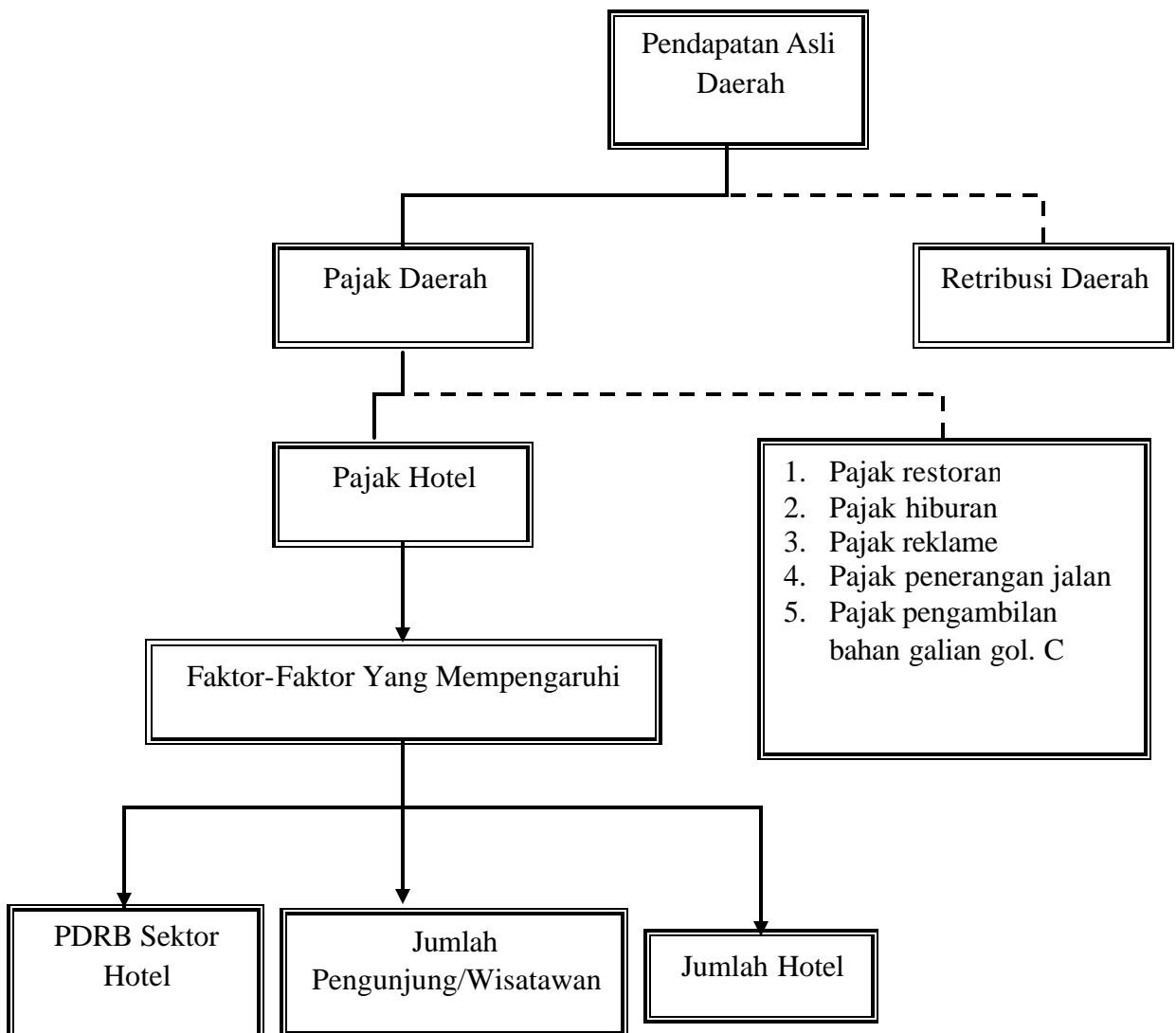
Jumlah pengunjung/ wisatawan. memiliki hubungan fungsional terhadap penerimaan Pajak Hotel. Semakin besar jumlah pengunjung otomatis menambah penerimaan dan sifatnya bukan sebagai identity karena objek pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak hotel.

Jumlah hotel adalah banyaknya jumlah hotel yang tersedia di kota Kendari menggambarkan seberapa banyak jumlah pengunjung yang dapat

menikmati fasilitas akomodasi hotel.

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan penerimaan pajak hotel dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut ini :

Gambar 1. Kerangka Pikir



H. Hipotesis.

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan dan dikaitkan dengan tujuan dari penelitian ini maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Diduga bahwa PDRB Sektor Hotel ,Jumlah Pengunjung/wisatawan, dan Jumlah Hotel secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Kendari.